

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, I. P. (2020). Implikasi Penerapan Ketentuan Umum PPh bagi WP Badan UMKM. *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan I*, 17-21.
- Ajzen, I. (2012). *The Theory of Planned Behavior*. (A. K. P. A. Van Lange, Penyunt.) Sage Publications Ltd.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019. Indonesia: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Diambil kembali dari <https://www.kemenkopukm.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021. Indonesia. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id>
- Budiman, J., & Herkulana. (2021). Peran UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pontianak. *Ekonomi Integra*, 91-98.
- Christian, Y. A., & dkk. (2019). Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap Penghitungan Pajak Peghasilan Badan pada PT Empat Tujuh Abadi Jaya. *Riset Akuntansi*, 10-17.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing among Five Approaches. 4th Edition*. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Gaspersz, V. (1988). *Manajemen Produktivitas Total*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Kementerian Investasi. (2020). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. Diambil kembali dari bkpm.go.id: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/>
- Kementerian Keuangan. (2021). *Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*. Diambil kembali dari kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/>
- KPP Pratama Pontianak Barat. (2021). *Buku Profil KPP Pratama Pontianak Barat*. Pontianak: KPP Pratama Pontianak Barat.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik* (4th ed.). Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Indonesia. (2011). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 Tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.
- Pemerintah Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

- Pemerintah Indonesia. (2017). Surat MENPAN-RB Nomor B/444/M.KT.01/2017 Tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-167/PJ/2018 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- Rawls, J. B. (1971). *A Theory of Justice*. Unite State of America: Harvard University Press.
- Santoso, Y. I. (2020). *Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM yang membayar Pajak Melandai*. Diambil kembali dari nasional.kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suci, T. S., & dkk. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Manado. *Riset Akuntansi*, 362-370.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Tommy. (2021). *Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?* Diambil kembali dari Sobat Pajak: <https://www.sobatpajak.com/article/>
- Torgler, B. (2003). *Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance*. Basel: University of Basel.
- Wikardojo, S., & dkk. (2021). Analisis Fasilitas Tarif Pajak Penghasilan Terutang Ditinjau dari Penghasilan Bruto. *Paradigma Ekonomika*, 417-424.
- Wildan, M. (2021, July 5). *Rencananya, Fasilitas Pengurangan Tarif 50% Pasal 31E UU PPh Dihapus*. Diambil kembali dari [news.ddtc.co.id](https://news.ddtc.co.id/): <https://news.ddtc.co.id/>